

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
u	SUARA KARYA	4	5-8-2002

Soal Pembagian Saham PT KPC

Pemerintah Cukup 10 Persen

JAKARTA (Suara Karya): Salah satu anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Drs. Priyo Budi Santoso mengusulkan, jika pembagian 51 persen saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) tidak diterima Pemprov Kalimantan Timur, sebaiknya pemerintah pusat membiarkan kembali persoalan itu, atau berbesar hati mengurangi komposisi bagian pemerintah pusat.

Ditemui di sela-sela acara ST MPR, Priyo lebih jauh mengatakan, solusi tersebut untuk menghindari berlarut-larutnya masalah divestasi saham KPC. "Bagian pemerintah tidak harus 20 persen, tapi cukup 10 persen sehingga yang 41 persen bisa dibagi antara Pemprov Kaltim Pemkab Kutai Timur," tambahnya.

Bagi Pemda, kata Priyo, komposisi 31 persen yang harus dibagi dua yakni Pemprov dan Pemkab, diakui sangat kecil bagi keduanya. tetapi kalau 41 persen, mereka tidak akan menjadi pemegang saham minoritas.

Dikatakan, jika sampai masa persidangan DPR RI mendatang masalah ini belum selesai, Komisi VIII berniat memanggil para pihak yang tersangkut dengan

masalah ini, sehingga kasus divestasi KPC tidak berlarut-larut.

Berupaya Maksimal

Kuasa hukum Pemprov Kaltim, Dermawan Nugroho, seperti dikutip *detikcom* mengatakan, PemProv Kaltim akan tetap berusaha untuk mendapatkan 51 persen saham PT Katim Prima Coal.

Pasalnya, ini merupakan amanat pihak DPRD Kaltim sekaligus masyarakatnya yang tidak bisa ditawar. Dengan adanya putusan 31 persen untuk PemProv dan Pemkab, dan 20 persen untuk pemerintah, artinya pemerintah sama sekali tidak menggubris aspirasi masyarakat Kaltim.

"Kita tetap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan 51 persen saham KPC. Soalnya kita harus menjalankan aspirasi DPRD dan masyarakat," ujar Dermawan singkat.

Ketika didesak upaya apa yang akan dilakukan Pemprov, Dermawan enggan menjelaskan. "Pokoknya kita akan bernegosiasi dengan pemerintah pusat, agar diperbolehkan membeli 51 persen saham itu," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dermawan juga mempertanya-

kan alasan pemerintah untuk tidak memberikan seluruh saham tersebut pada Pemprov dan Pemkab.

"Kenapa kita dihalang-halangi? Apa alasan pemerintah atas keputusan pembagian itu? Apakah untuk suatu kepentingan atau bagaimana?" tanya Dermawan. Soalnya dengan perolehan PemProv dan Pemkab yang cuma 31 persen, membuat kliennya sulit menggandeng investor.

Ketika ditanya apakah sudah ada pernyataan formal dari mitra strategis PemProv dan Pemkab untuk mundur menjadi mitra, Dermawan mengaku belum.

"Memang belum ada yang mundur, mereka masih menunggu waktu," katanya.

Seperti diketahui, proses divestasi 51 persen saham KPC yang berlarut-larut itu, akhirnya diakhiri dengan keputusan pemerintah untuk membagi 31 persen untuk Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur.

Sedangkan 20 persen sisanya akan dibeli pemerintah sendiri melalui PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA). Harga yang telah disepakati adalah 419,2 juta dolar AS untuk 51 persen saham KPC. (W-1/dtc)